

DEKLARASI ALIANSI PEREMPUAN INDONESIA

Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2026

Kami, Aliansi Perempuan Indonesia (API) yang terdiri dari organisasi perempuan, jurnalis, pekerja rumah tangga, ulama perempuan, perempuan masyarakat adat, LGBTIQ+, nelayan, serikat pekerja, organisasi disabilitas, organisasi lingkungan dan hak asasi manusia, serta komunitas akar rumput, menyatakan sikap politik dan seruan perjuangan Bersama dengan Tema **“Perempuan Bersatu Melawan Penghancuran atas Tubuh”**

1. Tubuh dan Hidup Perempuan Bukan Milik Negara

Kami menolak segala bentuk kontrol negara atas tubuh, seksualitas, dan hak reproduksi perempuan.

Kami menolak segala bentuk eksploitasi kerja perempuan. Kami mau kerja layak, tanpa diskriminasi dan bebas dari kekerasan.

Kami menuntut pengakuan atas hak kesehatan reproduksi yang aman, tanpa diskriminasi, serta penghentian kriminalisasi terhadap perempuan dan kelompok ragam gender dan seksualitas.

Kami menolak segala bentuk kontrol negara dan institusi medis atas tubuh perempuan disabilitas psikososial. Hentikan Pengurangan Perempuan Disabilitas Psikososial di Panti, Rumah Sakit Jiwa, dan Institusi Rehabilitasi. Hapus Sistem Pengampunan dan Substitutif Hukum, Negara Harus Mengakui Kapasitas Hukum dan Politik Perempuan Disabilitas Psikososial. Kami mau hak atas penentuan nasib sendiri.

2. Mengakui Kekerasan Negara terhadap Tubuh Perempuan sebagai Kejahatan Kemanusiaan

Kami menuntut pengakuan atas sejarah kekerasan negara terhadap perempuan, termasuk peristiwa 1965, tragedi Mei 1998, dan kasus Marsinah serta Ita Martadinata.

Mendesak pembentukan Femicide Watch untuk dokumentasi, pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban

Kami menuntut pengakuan atas politik negara yang diskriminatif terhadap Perempuan Disabilitas Psikososial yang selama ini diwujudkan melalui pengurangan, penempatan di institusi, dan praktik perampasan hak atas tubuh dan kehidupan mereka. Akhiri Institusi Pengurangan Atas Nama Perawatan Sekarang Juga!

3. Melawan Arah Politik dan Ekonomi Negara yang Mengabdikan pada Kekuasaan Pemimpin Dunia Pro Perang

Kami Menolak kebijakan ekonomi dan perdagangan yang melemahkan kedaulatan bangsa serta memperburuk eksploitasi perempuan dan pekerja.

Kami menolak kebijakan ekonomi untuk perang dan ekspansi militer yang akan menghancurkan kehidupan rakyat, menciptakan penderitaan massal dan disabilitas baru akibat kekerasan, konflik, dan perampasan ruang hidup.

Kami Menegaskan bahwa perdamaian dunia adalah syarat mutlak bagi pembebasan tubuh perempuan dari kekerasan.

3. Kami Mau Perubahan Sistem

Kami menuntut negara mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM dan mengadili para pelanggar HAM. Stop Impunitas!

Kami menuntut pemerintah untuk mengembalikan Sistem Demokrasi dengan Partisipasi Rakyat dan Suara Perempuan, kami menolak penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang.

Kami menuntut pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dan komunitas adat.

Hentikan Proyek Strategis Nasional yang mengeruk tanah, memabat hutan, menghilangkan sumber mata air dan menghancurkan identitas masyarakat adat. Kekerasan terhadap perempuan yang menolak proyek ekstraktif dan tambang harus dihentikan sekarang juga!

Bangun Sistem Dukungan Berbasis Komunitas Sebagai Alternatif Perawatan yang Menghormati Martabat dan Kebebasan Keragaman Tubuh.

Kami Mau Demokrasi yang Berpihak pada Perempuan dan Rakyat!

Deklarasi ini bisa dibacakan di Panggung Perempuan Bersatu di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, sebagai manifesto politik gerakan perempuan.